

# IMPLEMENTASI PROGRAM KANG PISMAN (KURANGI, PISAHKAN DAN MANFATKAN) SAMPAH DI KELURAHAN RANCANUMPANG KOTA BANDUNG

Oleh

Dina<sup>1)</sup>, Mochamad Zakaria<sup>2)</sup>, Edi Iskandar<sup>3)</sup> Rafly Hermana Suherlan<sup>4)</sup>

<sup>1) 2) 3) 4)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung  
E-mail : dina.shusein@gmail.com<sup>1)</sup> zakariamoch97@yahoo.co.id<sup>2)</sup> ediiskandar@gmail.com<sup>3)</sup>  
raflyhermana001@gmail.com<sup>4)</sup>

**ABSTRAK.** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai implementasi program Kang PisMan sampah di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, fokus penelitian ini yaitu menganalisis implementasi program. Latar belakang penelitian ini karena dalam pelaksanaan implementasi program, aparat pemerintah kelurahan masih belum optimal maka diperlukannya penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kang PisMan sampah di Kelurahan Rancanumpang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji validasi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Pelaksana, Pegawai Kebersihan Gober, dan 3 orang masyarakat Kelurahan Rancanumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kang PisMan masih perlu ditingkatkan, karena masih ada beberapa kendala atau kesalahan yang perlu diperbaiki.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Program Kang PisMan, Pengolahan Sampah

**ABSTRACT.** This research is a qualitative research regarding the implementation of the Kang PisMan trash program in Rancanumpang Village, Gedebage District, Bandung City, the focus of this research is to analyze program implementation. The background of this research is because in the implementation of the program, the village government apparatus is still not optimal, so this research is needed. The aim of this research is to find out the implementation of the Kang PisMan trash program in Rancanumpang Village. Data collection techniques used in this study are interviews, documentation, observation and triangulation techniques. Data analysis techniques using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. While the data validation test used in this study uses triangulation techniques with sources, meaning comparing and checking back the degree of trust of an informant obtained through different times and tools in qualitative research. The informants in this study were the Village Head, Executor, Scrooge Cleaning Officer, and 3 people from the Rancanumpang Village community. The results of the research show that the implementation of the Kang PisMan program still needs to be improved, because there are still some problems or errors that need to be fixed.

**Keywords:** Program Implementation, Kang PisMan Program, Waste Management

## PENDAHULUAN

Sampah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dewasa ini. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia berpotensi untuk menghasilkan sampah. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang masih berkecimpung dipermasalahkan pengolahan sampah, terutama pengelolaan sampah rumah tangga.

Pertumbuhan infrastruktur di kota-kota besar, termasuk kota Bandung, berdampak pada banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Hal ini menjadi masalah serius dan memerlukan pemecahan dengan segera, mengingat sampah yang berserakan tidak dapat ditempatkan begitu saja ditengah

masyarakat karena dampak polusi, kotor dan bau yang ditimbulkannya.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan sampah. Produksi sampah kota Bandung per hari mencapai 1.600 ton dan 150 ton diantaranya adalah sampah plastik. Berkaitan dengan produksi sampah rumah tangga, kota Bandung menghasilkan 1048 ton sampah rumah tangga/berasal dari permukiman per hari. Data dan pernyataan diatas menunjukkan bahwa permasalahan sampah di kota Bandung merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya yang cukup massif dan menyangkut berbagai sisi kehidupan.

Upaya penanganan sampah di Kota Bandung perlu dilakukan secara tepat dan perlu melibatkan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dilakukan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakannya. hukum. Peristiwa yang terjadi antara lain banjir, tanah longsor, dan pencemaran puing-puing.

Sampah merupakan masalah besar yang harus kita hadapi saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Residu ini diproduksi oleh manusia setiap kali mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Ia bermaksud agar pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengubah sampah menjadi sumber energi.

Dalam mengatasi permasalahan sampah, sudah terdapat beberapa program-program maupun kebijakan. Salah satu programnya adalah pengolahan sampah rumah tangga dengan prinsip TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Program ini mulai digencarkan oleh Pemkot Bandung pada 2011 seiring dengan dibentuknya Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011. Meskipun telah hadirnya TPS 3R ini, nyatanya beberapa TPS di kelurahan rancunumpang belum mampu mereplikasi hal ini. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi peneliti pada salah satu TPS yang menunjukkan belum adanya pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah berbasis 3R.

Pada 2018 Kota Bandung meluncurkan sebuah program bernama Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) Sampah.

Gerakan Kang PisMan yaitu Pengelolaan Sampah dengan Pengurangan, Pemilahan dan Pemanfaatan untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan Kota Bandung bebas dari sampah organik dan anorganik yang dapat digunakan kembali. Program ini memiliki 3 fokus utama dan teknis pelaksanaan berdasarkan laman web panduan Kang Pisman dalam penanganan dan pengelolaan sampah yaitu:

#### 1. Kang (Kurangi)

Dalam mengurangi produksi sampah rumah tangga, masyarakat setiap hari harus membiasakan untuk (1) Mengurangi penggunaan kantong plastik, Styrofoam dan bahan lain yang sulit diurai oleh alam. (2) Menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. (3) Membawa kantong belanja, tempat makan dan minum sendiri ketika berpergian. (4) Makan dan minum secukupnya dan menghabiskannya.

#### 2. Pis (Pisahkan)

Di rumah, masyarakat dapat membagi tempat sampah menjadi 3 jenis berbeda yaitu (1) Jenis 1 berisi sampah sisa makanan & tumbuhan, ditempatkan pada ember tertutup. (2) Jenis 2 berisi kertas, kaleng, gelas & botol plastik, ditempatkan pada kotak kardus. (3) Jenis 3 berisi sampah lainnya ditempatkan pada tong sampah.

#### 3. Man (Manfaatkan)

Sampah yang sudah dipisahkan, dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya yaitu: (1) Sampah jenis 1 diolah kedalam biopori, komposter, takakura, bata terawang, biodigester, maggot BSF, serta menjadi makanan ternak dan kascing. (2) Sampah jenis 2 dapat dijadikan sedekah sampah ataupun diberikan kepada bank sampah terdekat. (3) Sampah jenis 3 dibawa ke Tempat Penampungan Sementara

(TPS) untuk diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir TPA oleh PD Kebersihan.

Dengan mendukung program pengelolaan sampah Kang PisMan, masyarakat Kota Bandung khususnya di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage perlu disosialisasikan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari penumpukan penyakit khususnya sampah plastik yang sulit terurai di tanah dan perlunya kerjasama antara pemimpin daerah dan masyarakatnya untuk mengimplementasikan program Kang PisMan dalam kehidupan mereka.

Kelurahan rancanumpang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Kelurahan ini terletak di ujung timur tenggara Kota Bandung dan terdapat aliran sungai atau masyarakat daerah menyebutnya walungan. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya berakhir di aliran sungai, tapi juga ada halaman rumah-rumah warga kelurahan.

Mata pencaharian masyarakat kelurahan rancanumpang mayoritas petani dan buruh pabrik. Membuang sampah sembarangan atau kealiran sungai bisa membuat berdampak terhadap hasil penapatan petani, selain itu nilai estetika lingkungan serta kesehatan lingkungan akan berkurang karena banyaknya sampah yang berserakan.

Menangani masalah sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga keterlibatan masyarakat. Pemerintah mendorong warga untuk terlibat dan peduli terhadap sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Ketika sebuah kawasan pemukiman menjadi kawasan zero waste, masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab untuk

mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya masing-masing. Pengelolaan masalah sampah di Kota Bandung memerlukan sistem dan metode pengelolaan yang baik yang dapat mengurangi sampah secara efektif (Sekarningrum et al., 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara kota”, kemudian dalam bahasa Sanksekerta yang disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.

Kebijakan publik merupakan sebuah kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia swasta. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat diberbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi utama kepada masyarakat atau publik. Kebijakan publik merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bernegara, kebijakan juga mengatur dalam lingkup politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Robert Eystone (2015:18) beliau mengungkapkan bahwa definisi dari kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan atau masyarakat, akan tetapi konsep kebijakan publik menurut Robert Eystone ini masih terlalu luas belum ada batasan di dalam definisinya. Thomas R. Dye (2015) memberi batasan terhadap kebijakan publik yaitu, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu yang tidak dilakukan (*public policy is whatever*

*government choose to do or not to do*) dikutip dalam (Mustari 2017).

Sedangkan Carl Federich dalam Budi Winarno (2016) mengungkapkan pendapatnya bahwa kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan maksud tertentu. Kebijakan publik mempunyai hubungan yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang menjadi sasaran atau target dari suatu kebijakan yang telah dibuat dikutip dalam (Mustari 2017).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sekaligus sebuah upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, serta dalam tahapan atau tenggat waktu tertentu. Kebijakan biasanya bersifat mendasar sebab kebijakan menggariskan pedoman umum sebagai landasan dalam bertindak guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

### A. Tinjauan Tentang Implementasi Program

#### 1. Pengertian Program

Sebelum berbicara mengenai implementasi Program ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai pengertian Program. Sebagian orang mendefinisikan secara umum bahwa program adalah sebuah rencana, contohnya saja jika seseorang ditanyakan mengenai program apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang maka mereka akan mengemukakan rencana-

rencana yang telah disusun untuk dapat dikerjakan di masa yang akan datang.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Menurut Arikunto & Jabar dalam (Ambiyar, dkk. 2019:17-18) menyatakan “program di definisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang”. Karena program merupakan suatu unit atau suatu kesatuan kegiatan maka dapat dikatakan bahwa program merupakan suatu sistem yang merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang bekerja dalam mencapai suatu tujuan kegiatan dalam sebuah organisasi.

## 2. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia Pendidikan. Konsep dasar dari implementasi program adalah mengacuh pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Menurut Merille S. Grindle dalam (Tresiana dan Duadji, 2017:46) menyatakan bahwa implementasi program merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara Tresiana dan Duadji (2017:48) memahami implementasi program sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan

(*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan program atau kebijakan.

Rondinelli (dalam Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

### a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi program, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial kultural serta keterlibatan penerima program.

### b. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

### c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi program perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*).

### d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan faktor-faktor diatas yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal

penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal serta berbagai keluaran dan hasil yang lain.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Yagus Triana H.S. & Kristian, I. 2021). Dari segi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapat data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan reliable. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai "Implementasi Program KANGPISMAN (Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan) Sampah Di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Program Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan) Sampah Di Kelurahan Rancanumpang

#### a. Indikator Organisasi

Organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dari suatu program. Menurut James L. Gibson c.s. dalam (Ruhana, F. 2018:5) menyatakan bahwa: "... Organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang

memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri". Sedangkan menurut Stephen R. Robbins dalam (Ruhana, F. 2018:6) seorang pakar tentang teori organisasi merumuskan organisasi sebagai berikut: "*An organization is a consciously coordinated social entity, ith a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals*".

Dalam menjalankan suatu program tidak akan terlepas dari pengaruh organisasi, sehingga dengan demikian implementasi program bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari konsep awal. Sama halnya dengan implementasi program Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) sampah, bahwa peran organisasi dapat menunjang keberhasilan dari program ini. Organisasi yang peneliti maksud ialah penataan kembali sumber daya manusia. Dengan begitu dapat bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur yang dibebankan sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap anggota dalam penyelenggaraan implementasi program.

Kejelasan dan kepastian dalam implementasi program merupakan salah-satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana penyelenggaraan diharapkan dapat tanggap dan bertanggungjawab dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi dan pelaksana program. Pihak pelaksana harus

bisa menjelaskan secara rinci prosedur yang harus dilengkapi dalam kepengurusan segala hal menyangkut administrasi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan implementasi program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat peneliti, memang kurangnya unit pelaksana teknis dan kurangnya partisipasi dari masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan program Kang PisMan di seluruh wilayah Kelurahan Rancanumpang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan implementasi program, aparat pemerintah Kelurahan sudah memberikan usaha yang baik terhadap masyarakat kelurahan. Namun masih ada kekurangan yang terjadi dilapangan karena kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan program dan tidak mengikutsertakan perwakilan RW dalam program ini. Contohnya tidak semua RW dapat menjalankan program dan bahkan ada sebagian masyarakat tidak tahu adanya program Kang PisMan ini.

#### b. Indikator Interpretasi

Kata Interpretasi sering muncul dalam bahasa Indonesia. Apa arti interpretasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) interpretasi adalah pemberian kesan, tafsiran, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Interpretasi secara umum diketahui sebagai proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan, maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Menurut Saeful dalam (Kurniawan 2022:30) mengatakan bahwa:

“Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan symbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan”.

Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Jika suatu objek (karya seni, ujaran, dll) cukup jelas maknanya, objek tersebut tidak akan mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya.

Dalam penelitian ini, Interpretasi yang dimaksudkan adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dengan adanya interpretasi diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memahami program Kang PisMan dan dapat menjalankan program dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam program Kang PisMan di Kelurahan Rancanumpang melalui media online maupun offline.

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat peneliti, penyebaran informasi yang dilakukan pelaksana program Kang PisMan hanya dilakukan di kantor Kelurahan saja, tidak melakukan sosialisasi ke antar RW yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Kang PisMan ini.

Peneliti dapat menyimpulkan dalam menjalankan implementasi program, aparat pemerintah kelurahan sudah menjalankan tugasnya dan sebagian masyarakat dengan mudah memahami program ini, contohnya di RW 06. namun banyaknya kalangan

masyarakat membuat kurang efektif dalam penyebaran informasi. Maka diperlukannya inovasi dalam penyebaran informasi program Kang PisMan baik secara offline maupun online agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

c. Indikator Aplikasi (penerapan)

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. Saat yang sama, menurut pendapat beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk mempraktikkan teori, metode, atau perilaku tertentu lainnya. Menurut Riant Nugroho dalam (Mustari, N. 2015:147-148) mengatakan bahwa “penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.

Gerakan Kang Pisman merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan kota Bandung itu sendiri, secara penerapan dalam gerakan Kang Pisman terdapat core (inti) dari pelaksanaan gerakan tersebut yakni Gerakan untuk memisahkan, mengurangi dan memanfaatkan sampah secara efektif dan efisien.

Gerakan yang muncul dan mulai masif sejak Oktober 2018 tentunya melewati tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya hingga menjadi suatu gerakan kebersihan

berbasis sosial yang terkenal dan dilaksanakan di kota Bandung. Tentunya secara sosialisasi ataupun isi dari gerakan Kang Pisman “bukan” sekedar berbicara mengenai gerakan untuk pengelolaan sampah saja tetapi ada juga aspek-aspek yang ditanamkan baik dari segi sosial, budaya, maupun kealaman itu sendiri.

Penerapan yang peneliti maksud ialah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dengan begitu pelaksanaan program dapat terlihat perkembangan atau progres yang didapatkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat peneliti, bahwa dalam menjalankan implementasi program, aparat pemerintah Kelurahan sudah menerapkan program dengan cukup baik walaupun tidak semua masyarakat antar RW bisa melakukan penerapan program ini dan banyaknya di RW 06 karena lahannya yang masih mumpuni dalam melakukan penerapan program ini. Namun selain itu cukup baik dengan tidak adanya pemanfaatan program untuk jadi bisnis individu.

Dengan adanya kendala yang sudah di sebutkan diatas, agar masyarakat dapat bisa melakukan penerapan program Kang PisMan ini, dibutuhkan inovasi pengolahan sampah yang cocok dengan masyarakat Kelurahan Rancanumpang dan program dapat mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat.

## 2. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kebijakan publik memang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Akan selalu ada halangan dan rintangan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan



karena adanya permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah akan selalu menemui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sama halnya dengan Penerapan program Kang PisMan di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung akan selalu ada hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Salah satu faktor ini yang dapat menghambat implementasi program ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang program Kang PisMan serta pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurman selaku masyarakat di Kelurahan Rancanumpang bahwa: “dari masyarakat juga memang kurang sadar akan menjaga kebersihan, banyak juga yang buang sampah sembarangan contohnya di sungai itu, kalo misalnya masyarakat udah sadar gak mungkin banyak sampah yang berserakan”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat dari implementasi program Kang PisMan yaitu kurang paham atau sadarnya masyarakat manfaatnya program Kang PisMan agar lingkungan tetap bersih dan sehat.

- b. Masih belum terkoordinasinya beragam pihak yang terlibat dalam program Kang PisMan

Faktor selanjutnya yang dapat menghambat implementasi program ini adalah kurangnya koordinasi beragam pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Agus selaku masyarakat

kelurahan Rancanumpang, bahwa: “kalo untuk melibatkan masyarakat masih kurang kang, buktinya banyak yang tidak tau adanya program ini, contohnya kaya saya. Jadi gamerata pelaksanaan programnya kang dan mungkin masyarakatnya yang tidak mau dilibatkan karena kerjanya masing-masing”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah kurangnya melibatkan masyarakat yang membuat penyebaran informasi dan penerapan program Kang PisMan yang tidak merata.

### 3. Upaya untuk mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program

- a. Sosialisasi pendidikan dan kesadaran masyarakat. hal ini yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan mengadakan sosialisasi pendidikan dan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang lingkungan sehat dan manfaat menjaga lingkungan sekitar. Tidak hanya dengan pemasangan tanda saja, akan tetapi melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti iklan, brosur, seminar, dan program-program edukasi baik kepada masyarakat maupun para asn.
- b. Lebih masif dalam mengajak masyarakat. Hal ini tentu perlu dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Kang Pisman, agar meratanya implementasi program di Kelurahan Rancanumpang, tidak hanya di RW 06 saja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisa data dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Implementasi program Kang PisMan di Kelurahan Rancanumpang masih belum cukup efektif, mengingat masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi mengenai:

### a. Organisasi

Masih ada kekurangan yang terjadi dilapangan karena kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan program dan tidak mengikutsertakan perwakilan RW dalam program ini. Namun aparat pemerintah Kelurahan sudah memberikan usaha yang baik terhadap masyarakat kelurahan.

### b. Interpretasi

Aparat pemerintah kelurahan sudah menjalankan tugasnya dan sebagian masyarakat dengan mudah memahami program ini, contohnya di RW 06. namun banyaknya jumlah masyarakat dan lingkungan yang luas membuat kurang efektif dalam penyebaran informasi. Maka diperlukannya inovasi dalam penyebaran informasi program Kang PisMan baik secara offline maupun online agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

### c. Penerapan (pengaplikasian)

Aparatur pemerintah Kelurahan sudah menerapkan program dengan cukup baik walaupun tidak semua masyarakat antar RW bisa melakukan penerapan program ini dan banyaknya di RW 06 karena lahannya yang masih mumpuni dalam melakukan penerapan program ini. Namun selain itu cukup baik dengan tidak adanya

pemanfaatan program untuk jadi bisnis individu.

Semoga program Kang PisMan ini dapat berjalan lancar dan semua masyarakat dapat sadar akan baiknya menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta menjadikan Kelurahan Rancanumpang menjadi kelurahan yang bersih dan sehat.

Hambatan-hambatan memang selalu ada dalam hal apapun, tidak terlepas dari program Kang PisMan ini. Ada beberapa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Kang PisMan ini menjadi bahan evaluasi kedepannya supaya tidak terjadi hal yang serupa dan program bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun.

Solusi yang sudah didapat harus segera dikerjakan agar jika terjadi hambatan yang serupa, bisa dapat diselesaikan sejak itu juga agar tidak terjadi hal yang sama dan menghambat pelaksanaan program Kang PisMan di Kelurahan Rancanumpang.

## SARAN

Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, untuk lebih meningkatkan implementasi program Kang PisMan sampah di Kelurahan Rancanumpang, maka dipandang perlu untuk memberikan saran sebagai implikasi penting bagi pihak-pihak terkait untuk menindak lanjutinya. Saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan perwakilan per RW agar penyebaran informasi dan penerapan di lapangan bisa merata ke seluruh masyarakat, serta adanya inovasi baru dalam pengelolaan sampah di kelurahan Rancanumpang.

2. Pelaksana Program Kang PisMan perlu adanya media yang khusus dilakukan untuk program Kang PisMan untuk menarik perhatian anak muda agar lebih tertarik kepada kebersihan lingkungan dan program Kang PisMan ini.
3. Lurah perlu adanya inovasi baru tentang pengolahan sampah yang sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. LOSEDA saja tidak efektif di daerah yang penduduknya padat karena tidak adanya lahan untuk melakukan pengolahan sampah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). Model implementasi program lembaga penjaminan mutu.
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. CV. Dharma Persada.
- Kastaman, R, dan Kramadibrata, M.A. 2007. Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Bandung: Humaniora.
- Kurniawan, B. D. (2022). Interpretasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Monografi Kelurahan Rancanumpang Tahun 2022 dan 2023
- Mubaraka, I. W, dan Chayatin, N. 2009. Ilmu Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Medika.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nyoman, G. I. (2017). Hukum Administrasi Negara. Singaraja, Buku Ajaar.
- Pasolong, H. (2016). Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta. Profil Kelurahan Rancanumpang Tahun 2023
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Ruhana, F. (2018). Teori Organisasi dan Implementasinya dalam Penataan Organisasi pada Perangkat Daerah.
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan edukasi kangpisan (kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah). Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 73.
- Sellang, K. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017, November). Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism). In Seminar Nasional Fisip Unila.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Yagus Triana. H.S., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. 19(3), 69–81